

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Cetakan Keempat*. Malang: UMM PRESS, 2017.
- Hoff, Jerry. *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia*. Edited by Kartini Mulyadi. Jakarta: tatanusa, 2000.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Ishaq, H. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. 7th ed. Jakarta: Balai pustaka, 1989.
- Kelsen, Hans. *Pure Theory of Law, Terjemah, Raisul Muttaqien, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media, 2007.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*. IV. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muljadi, Kartini. *Kepailitan Dan Penyelesaian Utang Piutang*. Edited by Rudy A Lontoh. Bandung: alumni, 2001.
- Nating, Imran. *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2004.
- Rusli, Tami. *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Bandar Lampung: UBL PRESS, 2019.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Sandi, Ferry. "Kasus Pailit Perusahaan Makin Marak Saat Corona, Tanda Apa?," 2020.
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan*. Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1998.

- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan “Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2002.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2008.
- Suhardo, Ety S. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*. Semarang: Prodi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suparji. *Kepailitan*. Jakarta: UAI PRESS, 2018.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Syahrani, H Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Widjaja, Ahmad Yani dan Gunawan. *Seri Hukum Bisnis : Kepailitan*. Edited by 4. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Wojowasito, S. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: chtiar Baru-Van Hoeve, 1997.
- Yuhelson. *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.
- Yunus, Irwansyah dan Ahsan. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020.
- Zulkarnain, Moch, and Al Mufti. *Tanggung Jawab Kurator Dalam Penjualan Harta Pailit Di Bawah Harga Pasar*. Vol. 1, 2016.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Kurator Dan

Pengurus.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Efisiensi Dan Transparansi Penanganan Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Di Pengadilan.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan Pengadilan

Putusan Nomor 50/PUU-XIII/2015

Putusan Nomor 883/Pid.B/2017/PN.Jkt.Tim

Putusan Nomor 275/PID/2018/PT.DKI

Karya Ilmiah

Dyani, Vina Akfa. "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte." *Jurnal Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): hlm. 162–176.

Erwinsyahbana, Tengku, dan Melinda. "Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas Dan Jabatan Berakhir." *Lentera Hukum* 5, no. 2 (2018): hlm. 323–340.

Rahmani, Imanuel. "Perlindungan Hukum Kepada Pembeli Dalam Kepailitan Pengembang (Developer) Rumah Susun" I, no. 1 (2018): hlm. 73–88.

Simanjuntak, Herry Anto. "Prinsip Prinsip Dalam Hukum Kepailitan Dalam Penyelesaian Utang Debitur Kepada Kreditur." *Justiqa* 2, no. 2 (2020): 17–28.

Sularto. "Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Dalam Kepailitan." *Mimbar Hukum* 24, no. 2 (2012): hlm. 187–375.

Wantu, Fence M. "Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim." *Jurnal Berkala Mimbar Hukum* 19, no. 3 (2007): hlm. 335–485.

Wardani Rizkianti, Muhammad Helmi FahrozI, Muthia Sakti. "Protection Against Creditors Rights Holders Fiduciary Guarantee Post Constitutional Court's No.18/PUU/XVII/2019." *Lambung Mangkurat Law Journal* 5, no. 2 (2020):

180–189

Wijayanta, Tata. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014): hlm. 216–226.

Zulkarnain, Moch, and Al Mufti. “Tanggung Jawab Kurator Dalam Penjualan Harta Pailit Di Bawah Harga Pasar” *Lex Renaissance* 1 Vol. 1, (2016); hlm. 92-106.

Sumber Lainnya

(AKPI), Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia. “Daftar Anggota Asosiasi Kurator Dan Pengurus Indonesia (AKPI),” 2019.

Adhey. “Gelar Bakti Sosial, IKAPI Semangati Anak-Anak Panti Asuhan Dengan Melakukan Ini.” *Pojok Satu*. Jakarta, 2022.

“Pengurusan Kepailitan.” *Kantor Wilayah DKI Jakarta Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia*, n.d.